Transformasi Struktural Kelembagaan dan Akumulasi Kapital Asing pada Pertumbuhan Ekonomi Etiopia

Dyah Nurrizkina Nugraheni
Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: Dyah.nurrizkina@gmail.com

Abstract

This work explains about how Ethiopia could become one of the highest economic growth countries in the world in 2015, given the state of Ethiopia is loaded with famine and civil war for more than three decades. Economic growth is not the first time reached by Ethiopia. In 1992, economic growth soared chart happened but its nature is unstable and continue to decline. Writer looked after the regime change in 1991, Ethiopia improve herself internally through structural and institutional transformation. But after the outbreak of war between Ethiopia with Eritrea in the period 1998-2000, Ethiopia back to improve herself but this time using foreign capital sources. Ethiopia conducts more intensive capital accumulation then build public infrastructure such as roads, transport, energy and telecommunications and information technology. Using a developmental state and the big push theory, this work explains how state took on the role as host of the national economic development and the accumulation of foreign capital as capital infrastructure development so that Ethiopia can catch up in economic growth.

Keywords: structural transformation, institutional transformation, developmental state, foreign capital accumulation, Etiopia, economic growth.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana Etiopia dapat menjadi salah satu negara pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada 2015, mengingat kondisi Etiopia yang sarat dengan bencana kelaparan dan perang sipil selama lebih dari tiga dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi ini bukan pertama kalinya dicapai Etiopia. Pada tahun 1992, grafik pertumbuhan ekonomi yang melejit juga pernah terjadi namun sifatnya tidak stabil dan berkelanjutan hingga grafiknya terus menurun. Penulis melihat setelah pergantian rezim pada 1991, Etiopia memperbaiki diri secara internal lewat transformasi struktural dan kelembagaan. Namun setelah pecah perang diantara Etiopia dengan Eritrea pada periode tahun 1998-2000, Etiopia kembali memperbaiki diri kali ini dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan eksternal. Etiopia melakukan akumulasi kapital secara lebih intensif untuk kemudian membangun infrastruktur publik seperti jalan raya, transportasi, energi dan teknologi telekomunikasi dan informasi. Dengan menggunakan pendekatan developmental state dan big push theory, tulisan ini menjelaskan bagaimana negara mengambil peran sebagai pemandu pembangunan ekonomi nasional dan melakukan akumulasi kapital asing sebagai modal pembangunan infrastruktur agar Etiopia dapat mengejar ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *transformasi struktural, transformasi kelembagaan, developmental state, akumulasi kapital asing, Etiopia, pertumbuhan ekonomi.*

Pendahuluan

Etiopia telah mencapai kemajuan pesat yaitu dari negara pembangunan ekonomi terendah dan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di dunia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada 2015. Bank Dunia melaporkan bahwa pada periode tahun 2011-2015, Etiopia sanggup mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi pada kisaran 8%-

13%.[1] Dua digit angka yang dicapai Etiopia ini mengejutkan para pengamat ekonomi mengingat perekonomian Etiopia tidak tumbuh berdasarkan ekspor minyak, non-oil economy, ataupun sumber hasil tambang lain yang biasa disebut dengan resource boom. Menurut laporan Overseas Development Institute, Etiopia tidak hanya berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi pesat namun prestasi ini juga dibarengi dengan peningkatan multidimensi yang salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan.[2] Tercatat pada tahun 2000, Etiopia memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di dunia yakni 56% (persen) dari total populasi bertahan hidup dengan penghasilan kurang dari US $1,25[3] per hari dan 44% berada di bawah garis kemiskinan nasional. Angka kemiskinan tersebut kemudian menurun dari 56% menjadi 31% dalam kurun waktu sebelas tahun. Peningkatan multidimensi ini juga terlihat pada akselerasi akses terhadap pendidikan dasar. Hanya terdapat 26% dari populasi anak di Etiopia pada tahun 1991 yang dapat mendapatkan fasilitas pendidikan sekolah dasar. Prosentase tersebut meningkat tajam pada tahun 2012 yaitu 95% dari populasi anak di Etiopia telah menerima pendidikan dasar[4].

Selain mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan multidimensi, Etiopia juga mampu mempertahankan indeks ketidakmerataan pendapatan pada tingkat yang rendah. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan sering kali akan ikut meningkat. Seperti yang terjadi di Tiongkok, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, koefisien Gini Tiongkok semakin meningkat yaitu dari 0,32 pada tahun 1990 menjadi0,37 pada 2011. Sebaliknya, Etiopia justru mengalami penurunan koefisien Gini yaitu dari 1,4 pada tahun 1995 menjadi 0,34 pada tahun 2011[5].

Grafik 1: Pertumbuhan Ekonomi Etiopia

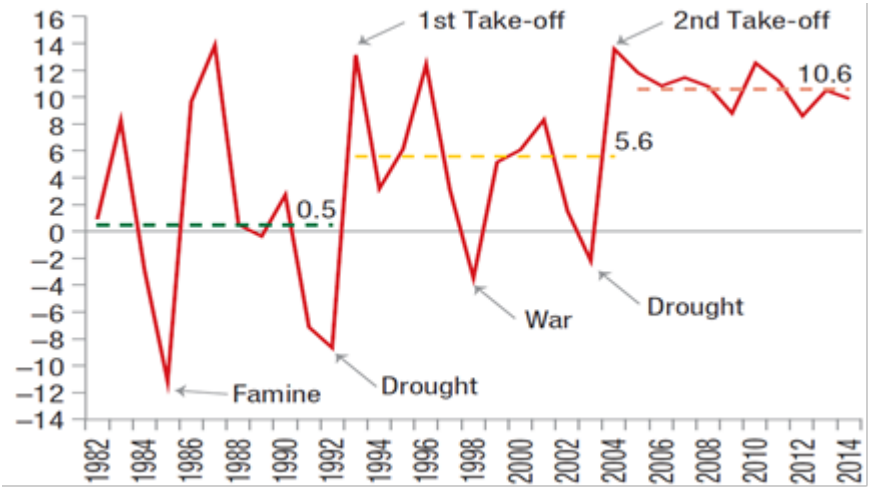

Sumber: Bank Dunia, 2016

[1] Bank Dunia. "Etiopia's Charts" [online] dalam http://www.theglobaleconomy.com/Etiopia/ (diakses pada 23 Maret 2016)

[2] Amanda Lenhardt et al. 2015. "One Foot on the Ground, one foot in the air: Ethiopia's delivery on an ambitious development agenda". Overseas Development Institute.

[3] Pada tahun 2000 nilai tukar dolar Amerika Serikat berada dalam kisaran 6000-9000 rupiah.

[4] EFME, Ethiopian Federal Ministry of Education. "Education Statistic Annual Abstract 2005 E.C (2012/2013 G.C). Addis Ababa. 2013.

[5] Amanda Lenhardt et al. "One Foot on the Ground, One Foot in the Air: Ethiopia's Delivery on an Ambitious Development Agenda".

Berdasarkan grafik 1.2, Etiopia mengalami gelombang pertumbuhan ekonomi pertama pada 1992 ketika pemerintahan Etiopia telah diambil alih oleh kelompok resisten gabungan EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) yang menjatuhkan rezim militer. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dipertahankan karena konflik perbatasan antara Etiopia dengan Eritrea pada tahun 1998. Konflik perbatasan ini semakin memanas hingga pada tahun 1999 terjadi perang terbuka diantara keduanya[6]. Serangkaian kejadian yang menyebabkan ketakstabilan politik tersebut semakin melemahkan perekonomian Etiopia pada saat itu. Namun kemudian, mulai pada tahun 2004, terjadi gelombang pertumbuhan ekonomi kedua yang mencapai nilai 13,57%[7]. Gelombang pertumbuhan ekonomi kedua ini lebih berkelanjutan daripada gelombang pertama, dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sampai pada tahun 2014, berdasarkan grafik 1.2 sebesar 10,6%. Dari fakta-fakta di atas menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana Etiopia, sebagai negara yang baru pulih dari serangkaian peristiwa ketakstabilan politik dan tidak mengandalkan komoditi minyak, dapat bertransformasi menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada tahun 2015.

Secara umum, negara-negara di Afrika mengalami halangan pertumbuhan ekonomi dikarenakan beberapa hal. Collier dan Gunning secara rinci telah menjelaskan halangan-halangan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan menggunakan hipotesis geografi, dan kelembagaan. Selain Collier dan Gunning, Jeffrey Sachs menyetujui bahwa kontur geografis seperti penyebaran sumber daya alam (SDA) yang tidak merata, iklim tropis yang menyebabkan merebaknya penyakit menular dan lain sebagainya, merupakan penyebab kelambatan ekonomi di Afrika[8]. Berbeda dengan Sachs, Radelet serta Acemoglu dan Robinson menitikberatkan hipotesis kelembagaan sebagai faktor utama perlambatan ekonomi di Afrika. Kebijakan yang buruk, hasil dari pengambilan keputusan oleh lembaga negara menjadi penyebab utama pengahalang pertumbuhan ekonomi di Afrika[9].

Fokus pada topik pertumbuhan ekonomi Etiopia, beberapa literatur sebelumnya menjelaskan fenomena ini merupakan hasil dari akumulasi kapital. Balcha menjelaskan bahwa kebijakan liberalisasi Etiopia berdampak pada peningkatan akumulasi total faktor produksi Etiopia.[10] Secara spesifik, Mustefa menemukan bahwa investasi baik pada sektor publik maupun privat merupakan penentu pertumbuhan ekonomi Etiopia.[11] Penemuan Mustefa kemudian dilengkapi dengan penemuan Gebru menggunakan indikator makroekonomi lain seperti ekspor, bantuan luar negeri, hutang eksternal dan akumulasi kapital yang juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Etiopia.[12] Batu kemudian membarui penemuan dengan menambahkan kontribusi sektor manufaktur serta jasa dalam faktor pertumbuhan ekonomi

[6] BBC.*Ethiopia Profile: Timeline.* 2016. Tersedia di http://www.bbc.com/news/world-africa-13351397 (diakses pada 4 Februari 2016).

[7] The Global Economy.http://www.theglobaleconomy.com/compare-countries/ data diambil dari Bank Dunia (diakses pada 4 Februari 2016).

[8] Sachs, "The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Times". 56-66.

[9] Radelet, "Success Stories from Emerging Africa". 90. Daron Acemoglu dan James A. Robinson. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. 39.

[10] Balcha. "Sources of Economic Growth in Etiopia: A Time Series Empirical Analysis, 1981-2009".

[11] Mustefa. "Private Investment and Economic Growth Evidence From Etiopia".

[12] Gebru. "The Determinants of Economic Growth in Ethiopia: A Time Series Analysis".

Etiopia.[13] Namun, tulisan sebelumnya belum secara rinci menjelaskan bagaimana peran pemerintah Etiopia di balik pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga tulisan ini akan mengisi kekosongan tersebut.

Dalam Hubungan Internasional, isu mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat lepas dari konteks ekonomi politik internasional. Asumsinya ialah setiap pengambilan kebijakan ekonomi dalam suatu negara pasti dipengaruhi oleh konteks internasional yang sedang terjadi. Berangkat dari asumsi tersebut, teori pembangunan ekonomi dalam hubungan internasional berupaya untuk mempersiapkan tatanan kelembagaan yang sesuai dalam mendukung aktivitas ekonomi. Tatanan kelembagaan yang baik bagi suatu negara tidak dapat dipukul rata. Namun setelah Perang Dingin berakhir, terdapat pola yang merebak di dunia yaitu gelombang transformasi struktural dan kelembagaan dari paradigma komunisme menjadi liberalisme. Kekalahan Uni Soviet membuktikan kejatuhan ideologi komunis dan sejenisnya sehingga banyak negara dunia ketiga kemudian mengalami transformasi baik struktural maupun kelembagaan dengan mengadopsi paket liberalisme dan demokrasi. Adopsi ini dilakukan lebih karena kedua sistem inilah yang kemudian diterima dalam pergaulan internasional. Namun konsekuensi dari adopsi oleh negara dunia ketiga adalah mereka harus menghadapi fase transisi dari tertutup, komunisme, menjadi terbuka, liberalisme.

Dalam masa transisi dari tertutup menuju terbuka, aktivitas ekonomi dalam negara miskin tidak dapat dilepas sendiri atau dibiarkan benar-benar terbuka. Zenawi dalam disertasinya menunjukkan bahwa adopsi liberalisme dan demokrasi tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang sedang terjebak pada siklus kemiskinan. Prinsip perdagangan bebas tidak dapat serta merta menumbuhkan rasa kewirausahaan warga dan kemudian menggerakkan roda ekonomi inklusif. Halangan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang ini hanya dapat dihapuskan oleh tindakan negara. Zenawi menyimpulkan bahwa pembangunan memiliki dimensi politik yang mana harus distabilkan terlebih dahulu. Menyusul kemudian proses ekonomi dan sosial. Penciptaan stabilitas politik yang kondusif dapat mempercepat proses pembangunan hanya ketika teori developmental state diterapkan. Teori developmental state kemudian dapat melengkapi paradigma alternatif dengan menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat melakukan intervensi untuk mempercepat pengangkatan kemiskinan warganya dan membawa negara pada pertumbuhan ekonomi yang pesat.[14] Di dalam paradigma developmental state, transformasi struktural dilakukan dengan memindahkan faktor produksi dengan kuantitas dan kualitas produktivitas rendah ke sektor produktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan transformasi kelembagaan dilakukan dengan melengkapi regulasi keterbukaan perdagangan.

Namun, transformasi struktural serta kelembagaan lewat paradigma developmental state saja tidak cukup untuk menjelaskan pencapaian Etiopia sebagai negara pertumbuhan ekonomi tercepat pada 2015. Pemerintah negara yang baru memulai proyek pembangunan ekonomi membutuhkan modal yang tidak dapat diandalkan hanya dengan pendapatan negara dari keterbukaan perdagangan. Pemerintah harus melakukan akumulasi kapital lebih dari sekedar melakukan ekspor yaitu dengan akumulasi kapital asing berupa investasi, dana hibah dan bantuan luar negeri. Akumulasi kapital asing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

[13] Batu. "Drivers of Ethiopian Economic Growth: A Systematic Review".

[14] Zenawi. "African Development: Dead Ends and New Beginnings".

negara miskin ini dijelaskan dalam big push theory. Big push theory menjelaskan bahwa negara-negara miskin dapat keluar dari jebakan kemiskinan setelah pemerintah melakukan intervensi dalam mengumpulkan kapital asing sebagai modal pembangunan ekonomi. Salah satu bentuk kapital asing yang dijelaskan Rosenstein dan Rodan dalam big push theory adalah bantuan luar negeri.

Bantuan luar negeri merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai modal untuk menjalankan industri serta kegiatan ekonomi di sebuah negara. Bantuan luar negeri memiliki peran sebagai dorongan besar untuk lepas dari jebakan kemiskinan. Ketika bantuan luar negeri berjumlah kecil, produktivitas ekonomi, melalui industri tidak bisa dianggap melewati garis depresiasi. Hal yang sama terjadi ketika bantuan ekonomi hanya diberikan dalam jangka waktu pendek. Proses big push tersebut naik dan berhenti pada satu titik tertentu, namun ketika bantuan luar negeri dihentikan, maka pertumbuhan ekonomi tersebut turun dan kembali lagi ke titik awal[15]. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan luar negeri dalam jumlah besar dan untuk jangka waktu yang panjang untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun seringkali, bantuan luar negeri dan hibah dengan bentuk aliran dana tentu akan sekedar habis untuk konsumsi[16]. Maka dari itu, dibutuhkan bentuk kapital asing lain yaitu investasi.

Berbagai bentuk akumulasi kapital asing ini kemudian dimanfaatkan untuk proyek pembangunan ekonomi jangka panjang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan ekonomi berbasis infrastruktur memiliki asumsi dasar bahwa porsi substansial dari sumber daya negara harus dialokasikan untuk aset jangka panjang sekaligus bersifat publik seperti akses jalan raya, transportasi, energi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, teknologi telekomunikasi serta informasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[17]

Transformasi Struktural Etiopia Periode Tahun 1992-2015

Pertama, penulis terlebih dahulu menjelaskan ketika Etiopia masih berbentuk monarki. Sejak Kerajaan Etiopia berdiri pada awal abad ke-12 sampai pertengahan periode Kaisar Haile Selassie I (1930-1974), Etiopia hanya mengandalkan sistem ekonomi subsisten yang ditopang dengan sektor agrikultur. Sistem ekonomi subsisten merupakan ekonomi non-moneter yang bertumpu hanya pada sumber daya alam untuk menyediakan kebutuhan dasar. Metode yang dilakukan dalam sistem ekonomi subsisten antara lain adalah berburu, pengumpulan bahan pangan dan subsisten agrikultur. Subsisten agrikultur sendiri merupakan swasembada pertanian yang mana petani hanya fokus untuk menumbuhkan hasil panen yang cukup untuk memberi makan diri sendiri dan keluarga, sehingga tidak akan muncul surplus atau perdagangan dalam sistem ini. Sektor agrikultur yang merupakan sektor utama Etiopia, diolah dengan metode primitif sehingga nilai produktivitas tetap padahal populasi semakin meningkat. Sistem ekonomi subsisten ini dipertahankan sampai pertengahan periode Haile Selassie I.[18] Sistem ekonomi subsisten merupakan sistem ekonomi yang paling primitif dan sistem ini dipertahankan sampai tahun 1953

[15] Paul Narcyz Rosenstein-Rodan, "Big Push" dalam *Natura Facit Saltum Analysis of the Disequilibrum Growth Process*. 1961. 211

[16] Alexander Culiuc dan Michael Walton, "The Big Push: what does it mean, and does it make sense for Ethiopia," dalam *Application and Cases in International Development*, 1.

[17] Teklebirhan Alemnew. "Public Infrastructure Investment, Private Capital Formation and Economic Growth in Ethiopia" 2016. Arba Minch University.

[17]Library Congress. "Country Profile:Ethiopia".

[18] ibid

oleh Etiopia sehingga tidak mengejutkan apabila pembangunan ekonomi di Etiopia tidak dapat dikembangkan.

Walaupun tiga periode repelita tersebut tidak dapat dikatakan gagal, namun efek yang ditimbulkan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum terasa. Masa transisi dari sektor agrikultur ke agro-industri juga tidak berjalan mulus. Tiga per empat penduduk Etiopia masih bekerja sebagai petani subsisten yang hidup miskin. Hingga pada awal 1970-an, perekonomian Etiopia terus mengalami defisit, elit politik mencoba untuk kembali melakukan pelarangan impor dan melanjutkan industri subsisten untuk meningkatkan keseimbangan perdagangan. Namun, usaha ini tidak terlalu membantu sehingga hibah dan pinjaman eksternal kemudian dimanfaatkan untuk menutupi defisit ekonomi. Kondisi perekonomian yang semakin memburuk berujung pada penggulingan kekuasaan feodal Kerajaan Etiopia oleh kekuatan militer pada tahun 1974.[19]

Peforma pertumbuhan ekonomi pada rezim Derg dapat dikelompokkan menjadi empat fase. Fase pertama terjadi pada 1974-1978, merupakan periode revolusi yang identik dengan pergolakkan politik internal, konflik bersenjata dan reformasi kelembagaan radikal. Pada fase kedua, 1978-1980, kondisi perekonomian mulai pulih seiring dengan implementasi reformasi kelembagaan dan konsolidasi pemerintah. Namun kondisi ini tidak bertahan lama. Fase ketiga yaitu pada 1980-1985, kondisi perekonomian mengalami banyak halangan. Pertama, pada kurun waktu 1984-1985 Etiopia mengalami kekeringan berkepanjangan sehingga produktivitas sektor agrikultur menurun. Kedua, pengeluaran pemerintah menitikberatkan pada sektor pertahanan yang mengambil 40-50% dari total pengeluaran sehingga hal ini sangat membebani perekonomian Etiopia. Fase keempat mendekati penggulingan rezim Derg yaitu pada periode 1985-1990, kondisi perekonomian tetap stagnan walaupun cuaca sudah membaik.[20] Kondisi tersebut membuktikan bahwa kondisi iklim tidak benar-benar menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Ketidakpuasan terhadap kondisi perekonomian memunculkan kelompok perlawanan dari berbagai daerah di Etiopia. Kelompok perlawanan ini berkoalisi dan membentuk EPRDF. EPRDF kemudian menggeser rezim Derg dan mengambil alih kekuasaan pada 1991. EPRDF mendominasi struktur kekuasaan dalam pemerintahan Etiopia dan secara terbuka mengadopsi kebijakan ekonomi berorientasi pasar. Hal ini dilakukan karena ideologi sosialisme tidak terima baik secara domestik maupun internasional, setelah Perang Dingin berakhir. Maka dari itu, pemerintah Etiopia kemudian mengadopsi liberalisasi dan sentralisasi yang mana merupakan antitesis dari sosialisme.[21]

Transformasi Kelembagaan Etiopia Periode Tahun 1992-2015

Transformasi kelembagaan berkaitan dengan perubahan lembaga negara yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. Dikatakan tertutup ketika lembaga bersifat membatasi akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi serta politik dan begitu pula sebaliknya bila dikatakan terbuka. Transformasi dari tertutup menjadi terbuka ini adalah masa yang paling berbahaya bagi negara. Walaupun dikatakan negara tersebut mengadopsi dari pengalaman negara lain yang berhasil dengan sistem yang sama namun pada kenyataannya transformasi ini semua tentang trial and error. Hal ini

[19] Ofcansky dan Berry, ``Ethiopia: A Country Study´´.

[20] ibid

[21] Geda A. "Macroeconomic Performance in Post-Derg Ethiopia". 2001. Northeast African Studies, Vol. 8, No 1, 159-204.

terjadi karena seperti yang peneliti menegaskan sebelumnya bahwa setiap negara, walaupun mengadopsi sistem yang sama, akan menghasilkan derajat adopsi yang berbeda-beda.

Lembaga ekonomi yang terbuka, menurut Acemoglu Robinson adalah lembaga ekonomi yang bersifat inklusif. Lembaga ekonomi inklusif akan membentuk insentif ekonomi untuk masyarakat sehingga mereka teredukasi untuk menabung, berinvestasi dan memiliki rasa kewiraswastaan. Namun untuk mewujudkan lembaga ekonomi inklusif, lembaga tersebut harus menciptakan kondisi perekonomian ramah bisnis sehingga halangan-halangan dalam berbisnis semakin tereduksi.[22]

Halangan dalam berbisnis diawali dengan menjelaskan transformasi hak atas properti di Etiopia. Bagi Etiopia properti paling berharga dari masa kekaisaran sampai sekarang adalah lahan. Pada era kekuasaan Kaisar Haile Selassie I, lahan hanya dimiliki oleh minoritas elit feodal dan mayoritas masyarakat Etiopia hanya dapat menyewa lahan tersebut. Walaupun secara hukum fungsi lahan baik untuk disewakan maupun digunakan sendiri merupakan hak setiap lapisan masyarakat, namun kaum elit ini memanfaatkan sistem kepemilikan lahan menjadi makar para elit. Pada era kekuasaan Derg, sistem feodal tersebut dihapuskan dan sistem ekonomi berubah menjadi sistem komando sosialis. Sistem hubungan tuan tanah degan penyewa dihapuskan dan masyarakat memiliki hak atas lahan mereka masing-masing. Namun, keamanan hak atas properti tidak terjamin pada masa Derg karena pemerintah sendiri melakukan kebijakan nasionalisasi bahkan atas properti swasta. Penyitaan properti swasta ini kemudian semakin menyuramkan perekonomian Etiopia. Ketika koalisi pemberontak, EPRDF, menggulingkan rezim Derg pada 1991, dan menjadi partai yang paling berkuasa di Etiopia, pemerintah menerapkan sistem hak atas properti yang sama sekali berbeda dengan dua rezim sebelumnya. Pemerintah mengatur keamanan kepemilikan properti swasta dan tidak membedakan kelas maupun gender, dapat memiliki dan menggunakan properti mereka tanpa perlu mengkhawatirkan akan disita, kecuali memang diatur demikian dalam hukum sebagai sanksi tertentu. Persamaan hak atas kepemilikan properti tertera dalam konstitusi tahun 1995, pasal 40, hak atas kepemilikan, penggunaan dan pembuangan hak atas lahan dengan cara dijual atau diwariskan, baik lahan pedesaan maupun perkotaan. Konstitusi 1995 juga menyatakan bahwa lahan merupakan properti umum yang dapat dimiliki baik pemerintah maupun rakyat Etiopia.[23]

Setelah adanya penjaminan atas keamanan dari kepemilikan properti privat, selanjutnya, untuk mewujudkan lembaga ekonomi inklusif, dibutuhkan kemudahan untuk memulai bisnis. Kemudahan dalam memulai bisnis dapat ditentukan dari kemudahan mendapatkan ijin pembangunan, aliran energi listrik, pendaftaran properti, pengajuan kredit, besar pajak dan regulasi perdagangan lintas batas.[24]

Akumulasi Human Capital sebagai Modal Pembangunan Sektor Sosial

Sebelum Tiongkok mulai intensif menjalin hubungan dengan negara-negara Afrika secara umum, pemain bantuan luar negeri di Afrika dipenuhi

[22] Acemoglu dan Robinson. "Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty".50.

[23] Tt. "Constitution of The Federal Democratic Republic of Ethiopia". 1995. Tersedia di http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/et/et007en.pdf (diakses pada 30 November 2016).

[24] The World Bank. "Doing Business: Ethiopia". 2016. Tersedia di http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ethiopia/ (diakses pada 30 November 2016).

oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat tergabung dan merujuk pada istilah donor tradisional. Donor tradisional lebih fokus pada sektor sosial seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, usaha pengurangan kemiskinan dengan suntikan dana untuk APBN. Dikarenakan Etiopia lebih dulu menjalin hubungan erat dengan donor tradisional, hal ini kemudian memengaruhi arah kebijakan mereka. Pembangunan ekonomi yang dicanangkan Etiopia memiliki tolak ukur yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan Millennium Development Goals (MDGs). MDGs merupakan rencana pembangunan yang diluncurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2007 yang fokus pada peningkatan human capital.[25]

Akumulasi Kapital Fisik sebagai Modal Pembiayaan Infrastruktur

Berbeda dengan donor tradisional, Tiongkok memiliki pola sendiri dalam pemberian bantuan luar negeri. Shimomura dan Ohashi menyebutnya sebagai Trinitas Kerjasama Pengembangan yang meliputi bantuan luar negeri, perdagangan, dan investasi. Selama beberapa dekade, terbukti bagaimana konsep bantuan, investasi, dan perdagangan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Melalui model ini, Tiongkok juga memperkenalkan perusahaan swasta yang didukung oleh Tiongkok untuk menjalankan perdagangan dan menanamkan investasi di negara-negara berkembang tersebut. Lewat Bank Exim (Export-Import) milik Tiongkok merupakan salah satu aktor penting dalam mendistribusikan bantuan luar negeri dari Tiongkok. Melalui model bantuan luar negeri tersebut pula, Tiongkok gencar mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang, yang dalam penelitian ini difokuskan di Afrika.[26]

Sejak diadakan pertemuan FOCAC (Forum on China Africa Cooperation) yang pertama pada tahun 2000 di Beijing, Tiongkok, dan pertemuan kedua pada tahun 2003 di Addis Ababa, Etiopia, delegasi Tiongkok mengumumkan program perlakuan tarif preferensial khusus untuk 29 negara termasuk Etiopia. Program ini menghilangkan bea impor pada 190 produk berbeda antara lain pangan, tekstil, mineral, dan mesin. FOCAC sangat membantu Etiopia terlebih setelah sebelumnya mengalami masa stagnasi ekonomi sampai tahun 2002 karena perang dengan Eritrea, berkat hubungan Sino-Etiopia ini, ekspor Etiopia tumbuh pesat. Kopi merupakan komoditas utama yang sejak dulu diunggulkan Etiopia sebagai komoditas ekspor. Komoditas kopi tercatat berkontribusi sebesar 53% dalam total ekspor Etiopia. Namun pada 2012 angka tersebut menjadi 31%. Hal ini bukan dikarenakan adanya penurunan produktivitas kopi namun lebih karena adanya pergeseran pada pola komoditas ekspor yang mengarah pada komoditas bernilai tinggi lain seperti wijen, bunga, dried chickpeas, dried beans, sayuran dan hewan ternak.[27] Diversifikasi agrikultur ini menandakan transformasi struktural Etiopia membuahkan hasil.

Selain dari sisi perdagangan, pemberian bantuan luar negeri juga merupakan salah satu Trinitas Kerjasama Pengembangan Tiongkok. Sejak tahun 2006 sampai 2012, Tiongkok telah memberikan dana pinjaman sebesar $3,3 milyar untuk melakukan 46

[25] X Furtado., W. J. Smith. "Ethiopia: Retaining Sovereignty in Aid relations" dalam L. Whitfield (ed.), *The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors*. 2009. Oxford: Oxford University Press, pp. 131-155.

[26] Yasutami Shimomura dan Hideo Ohashi. "A Study of Tiongkok's Foreign Aid: An Asian Perspective". 2013. Palgrave Macmillan. 130.

[27] Comos Ochieng. "Mapping Chinese Development Assistance in Africa: Study Case Ethiopia". AFRODA. 2011.

proyek pembangunan di Etiopia. Pinjaman tersebut dialokasikan untuk implementasi proyek pembangunan seperti Ethio-Tiongkok Friendship Road, peningkatan teknologi telekomunikasi, institut pelatihan vokasi skala besar yang ditempatkan di Addis Ababa, pembangunan rumah sakit, pabrik gula, jalur kereta dan lain sebagainya. Bantuan pembangunan infrastruktur dari Tiongkok untuk Etiopia sebesar 96%, dialokasikan pada tiga sektor berikut, antara lain pembangkit dan suplai energi sebesar 52%, transportasi sebesar 32% dan industri sebesar 12%. Tidak hanya pinjaman, pada tahun 2007, Etiopia dan Tiongkok menandatangani kesepakatan penghapusan hutang di Addis Ababa sebesar $18.5 juta. Pemerintah Tiongkok juga membatalkan tempo pembayaran hutang-tanpa bunga yang jatuh pada tahun 2009.[28] Hubungan Sino-Etiopia ini semakin intensif ketika Pemerintah Tiongkok dan Etiopia telah mendirikan komisi gabungan yang terdiri dari Kementrian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi (MoFED) Etiopia dan perwakilan dari Menteri Perdagangan Tiongkok. Komisi gabungan ini berfungsi sebagai wadah diskusi pada isu-isu umum tentang perdagangan dan investasi.[29]

Selain perdagangan dan bantuan luar negeri, Trinitas Kerjasama Pengembangan Tiongkok juga memiliki unsur investasi. Investasi Tiongkok di Etiopia, sama halnya dengan negara Afrika lain, memiliki tiga kategori yaitu FDI (Foreign Direct Investment) pada sektor pencarian SDA yang merupakan industri ekstraktif seperti minyak dan gas. Kedua, penanaman FDI sebagai motif pencarian pasar seperti pada sektor manufaktur, pembangunan dan transportasi. Terakhir, penanaman FDI untuk tujuan efisiensi, terutama pada sektor agrikultur atau sektor lain yang memproduksi barang lebih efisien untuk kemudian dijadikan bahan produksi di Tiongkok.[30] Relasi Sino-Etiopia semakin menguat terutama pada ketiga sektor penanaman FDI di atas seperti sektor pembangunan jalan, suplai barang-barang manufaktur dari Tiongkok, telekomunikasi dan instalasi listrik oleh perusahaan Tiongkok. Perusahaan Tiongkok yang menyediakan pelayanan telekomunikasi dan instalasi listrik tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian bantuan dikarenakan perusahaan barat menolak untuk melakukan hal tersebut.[31]

Dari penjelasan tentang masing-masing pola sumber akumulasi kapital eksternal yaitu donor tradisional dan Tiongkok, terlihat bahwa keduanya amat bertolak belakang. Kebijakan Tiongkok pada Etiopia sangat berbeda dengan kebijakan negara-negara donor tradisional pada Etiopia. Para donor tradisional memperlakukan Etiopia sebagai penerima bantuan sedangkan Tiongkok mengembangkan hubungan persekutuan dengan Etiopia.[32] Negara-negara donor baru seperti Tiongkok bukan merupakan bagian dari donor tradisional seperti yang disepakati dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Development Assistance Committee

[28] World Bank Group. "Ethiopia's Great Run: The Growth Acceleration and How to Pace It".

[29] Christopher L. Burke, Lucy Corkin dan Nastasya Tay. "China's Engagement of Africa: Preliminery Scoping of African case studies, Angola, Ethiopia, Gabon, Uganda, South Africa, Zambia". 2007. Tersedia di www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2009/04/rf_paper_final.pdf (diakses pada 2 Desember 2016).

[30] Davies, M. et al. "How China delivers development assistance to Africa". 2008. Centre for Chinese Studies, University of Stellenbosch.

[31] Seifudden Adem. "China in Ethiopia: Diplomacy and Economics of Sino-optimism". 2012. African Studies Review, 55 (1), 143–160.

[32] Seifudden Adem. "China in Ethiopia: Diplomacy and Economics of Sino-optimism". African Studies Review, 55 (1), 143–160.

(DAC) dalam hal kerjasama mereka dengan negara-negara Afrika.[33]

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mendasar yaitu dalam mendefinisikan pemberian kapital asing. Donor tradisional mendefinisikan bantuan pembangunan sebagai dana hibah, pinjaman, subsidi APBN, bantuan dalam program spesifik seperti bantuan pangan, penghapusan hutang dan lain sebagainya. Di lain pihak bentuk kapital asing yang dikeluarkan Tiongkok adalah cendurung pada pengadaan kerjasama Tiongkok dengan Etiopia yang sarat dengan perdagangan dan investasi. Selain itu, Tiongkok tidak menghitung aliran kapital yang dikeluarkan seperti standar DAC sehingga sulit untuk melacaknya.[34]

Berdasarkan pada paparan data dan fakta yang dijelaskan dua bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa dari ketiga periode transformasi rezim yang telah dilalui Etiopia, menjadi semakin jelas bahwa kebijakan ekonomi pembangunan yang diterapkan dalam tiap rezim berbeda. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa Etiopia memiliki permasalahan pada level struktural dan kelembagaan. Hal ini dapat dibuktikan dari bagaimana periode Kaisar Haile Selassie gagal dalam mengimplementasi kebijakan agro-industri sedangkan kebijakan tersebut sukses sebagai inisiator pertumbuhan ekonomi Etiopia.

Etiopia sukses dalam melewati transisi kebijakan dari subsisten agrikultur menuju agro-industri kemudian diversifikasi lebih meluas pada sektor jasa juga didukung oleh kebijakan transformasi kelembagaan. Kesuksesan transisi Etiopia ini dapat dilihat dari meningkatnya diversifikasi lapangan pekerjaan dan sumber kontribusi PDB yang tidak hanya ditopang lewat komoditi agrikultur seperti kopi namun juga mulai merambah pada komoditas sepatu dan komoditas manufaktur lainnya. Lebih jauh daripada itu, diversifikasi ini juga merambah pada sektor jasa teurtama pada sub-sektor finansial dan pariwisata. Selain berhasil mengahadapi transisi struktural, pemerintah juga berhasil membawa Etiopia menuju transformasi kelembagaan dengan membuka akses warga Etiopia pada sektor ekonomi dan politik. Pembukaan akses tersebut dimulai dengan mengenali hak atas properti privat bagi warga Etiopia. Penjaminan hak atas properti privat ini merupakan instrumen bagi warga Etiopia untuk dapat mengembangkan lembaga ekonomi yang lebih inklusif.

Namun, perbaikan secara internal saja tidak cukup untuk membawa Etiopia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2015. Dibutuhkan dorongan akumulasi kapital asing baik dari donor tradisional maupun Tiongkok yang dilakukan oleh pemerintah Etiopia dapat memenuhi syarat big push theory. Pertama, Tiongkok sebagai donor akumulai kapital asing, menyediakan jenis akumulasi kapital yang mayoritas berupa kapital fisik. Kapital fisik yang paling berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Etiopia adalah investasi jangka panjang pada infrastruktur publik. Setelah kualitas dan kuantitas infrastruktur publik meningkat, hal ini kemudian dimanfaatkan Etiopia sebagai modal dalam pembangunan ekonomi. Kedua, donor tradisional yang memiliki fokus pada sektor sosial, masuk dalam akumulasi human capital. Donor tradisional mampu meningkatkan modal human capital di Etiopia lewat pemberian program bantuan pangan, kesehatan dan pendidikan.

[33] Cristine Hackenesch. "Competing for Development? The European Union and China in Ethiopia". 2011. Stellenbosch Centre for Chinese Studies.

[34] Michael Geiger, Chorching Goh, Jingyi Zhang, Xiaochen Fu, Danqing Zhu, Jingyang Zhang, Su Qian. *Chinese FDI in Ethiopia*.The World Bank Group. 2012.Geiger et.al. "Chinese FDI in Ethiopia". The World Bank Group. 2012.

Walaupun pada sub-sub bab sebelumnya dijelaskan bagaimana akumulasi kapital dari donor tradisional berbeda dengan donor Tiongkok namun bukan berarti kemudian Etiopia akan menghentikan salah satunya. Segala bentuk bantuan untuk Etiopia baik dari donor tradisional atau baru, bersifat komplementer atau saling melengkapi karena mereka bergerak di sektor yang berbeda-beda sehingga jenis pemberian bantuan pun menjadi berbeda. Hal ini kemudian yang mendorong pertumbuhan ekonomi Etiopia dari berbagai sisi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berasal dari akumulasi kapital fisik namun juga human capital membawa Etiopia untuk memenuhi indikator pengangkatan kemiskinan dalam agenda MDGs. Akumulasi kapital fisik kemudian membawa Etiopia dalam keberhasilan agenda GTP I yang berakhir pada 2015.

Sifat komplementer yang terlihat dari dua tipe donor non-tradisional yaitu antara Turki dan Tiongkok dapat diibaratkan sama dengan tipe donor tradisional dengan non-tradisional. Keduanya sama-sama bergerak dalam pembangunan infrastruktur, teknologi dan perdagangan namun memiliki preferensi sektor masing-masing. Tiongkok fokus pada tiga sektor yaitu energi, transportasi dan telekomunikasi sedangkan Turki fokus pada infrastruktur sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan air, infrastruktur produksi serta infrastruktur ekonomi seperti sektor bank dan finansial. Baik bantuan luar negeri Turki maupun Tiongkok tidak kemudian menunjukkan suatu bentuk pendekatan pemberian bantuan luar negeri yang baru. Hal tersebut hanya menunjukkan bagaimana pemain baru memasuki tatanan bantuan luar negeri di Afrika. Sedangkan donor tradisional melengkapi akumulasi kapital asing Etiopia dengan memberikan modal untuk pembangunan sektor sosial seperti kesehatan, pangan dan pendidikan.

Pada akhirnya, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa transformasi struktural serta kelembagaan dan akumulasi kapital asing yang membiayai pembangunan infrastruktur publik, berhasil membawa Etiopia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2015. Peneliti tidak menampik bahwa Etiopia belum mengalami pertumbuhan ekonomi secara merata. Untuk menuju pada kesejahteraan, Etiopia masih harus mengejar ketinggalan yang jauh. Namun, progres Etiopia ini patut diapresiasi karena Etiopia dapat menjadi representatif negara-negara miskin yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri bukan merupakan indikator yang menunjukkan bahwa negara tersebut sejahtera. Namun pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menunjukkan bahwa negara tersebut mengalami kemajuan menuju pembangunan ekonomi yang lebih baik..

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

[1] Acemoglu, Daron dan James A. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New York: Crown Business. 2012.

[2] Blaxter, et al. How to Reasearch (terj.). Jakarta: Indeks. 2006.

[3] Bremmer, Ian. The J Curve: A New Way to Underst and Why Nations Rise and Fall. New York: Simon & Schuster. 2006.

[4] Clay, Jason W. dan Bonnie K. Holcomb. Politics and the Ethiopian Famine, 1984-1985. Cambridge, M.A: Cultural Survival. 1986.

[5] Douglass North, John Joseph Wallis dan Barry R. Weingast.Violence and Social Orders. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.

[6] Ofcansky, P. T. and Berry L. (1991), ``Ethiopia: A Country Study´´. Washington: GPO

[7] Onyeiwu,Steve.Emerging Issues in Contemporary African Economies: Structure Policy and Sustainability. (Palgrave Macmillan, 2015), 182.

[8] Rodrik, Dani. “Imperfect Competition, Scale Economies and Trade Policy in Developing Countries” dalam Trade Policy Issues and Empirical Analysis, ed. Robert

Baldwin,109-144. Chicago: University Chicago Press, 1998.
[9] Rostow, Walt Whitman. The Stages of Economic Growth: A Non-Comunist Manifesto. Cambridge University Press.
[10] Sachs, Jeffrey D. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Times. New York: The Penguin Press. 2006.
[11] Shimomura, Yasutami dan Hideo Ohashi, A Study of Tiongkok's Foreign Aid: An Asian Perspective. Palgrave Macmillan. 2013.
[12] Singarimbun, Irawati. "Metode dan Proses Penelitian". 1981.
[13] Thakkar, Ashish J. The Lion Awakes: Adventures in Africa's Economic Miracle. New York: St. Martin's Press. 2015.

Jurnal dan Jurnal Elektronik
[14] Adem, S. 2012. China in Ethiopia: Diplomacy and Economics of Sino-optimism. African Studies Review, 55 (1), 143–160.
[15] Batu, Muhdin Muhammedhussen. "Drivers of Ethiopian Economic Growth: A Systematic Review". International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 6, Issue 3, 2016.
[16] Burke, C. L. dan N. Tay Corkin. China's Engagement of Africa: Preliminery Scoping of African case studies, Angola, Ethiopia, Gabon, Uganda, South Africa, Zambia. www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2009/04/rf_paper_final.pdf (diakses pada 2 Desember 2016).
[17] Culiuc, Alexander dan Michael Walton, "The Big Push: what does it mean, and does it make sense for Ethiopia," dalam Application and Cases in International Development.
[18] Collier, Paul dan Willem Jan Gunning, "Why Has Africa Grown Slowly?," Journal of Economic Perspective 13, no. 31 (1999): 3-22.
[19] Davies, M. et al (2008) 'How China delivers development assistance to Africa', Centrefor Chinese Studies, University of Stellenbosch.
[20] Dercon, Stefan. Growth, Shocks and Poverty during Economic Reform: Evidence from Rural Ethiopia. CSAE, Department of Economics, Oxford. 2002.
[21] Franke, Sophia Gollwitzerdan Marc Quintyn. Institutional Transformations, Polity and Economic Outcomes:Testing the North-Wallis-Weingast Doorsteps Framework. IMF Institute. 2012
[22] Furtado, X., W. J. Smith (2009), Ethiopia: Retaining Sovereignty in Aid relations, in:
[23] L. Whitfield (ed.), The Politics of Aid. African Strategies for Dealing with Donors,Oxford: Oxford University Press, pp. 131-155.
[24] Geda A. "Macroeconomic Performance in Post-Derg Ethiopia". 2001. Northeast African Studies, Vol. 8, No 1, 159-204.
[25] Geda A. and Degefe B. (2005): ``Explaining African Economic Growth Performance: The Case of Ethiopia´´. African Economic Research Consortium, Working paper 45.
[26] Hackenesch, Cristine.Competing for Development? The European Union and China in Ethiopia. Stellenbosch 2011. Centre for Chinese Studies.
[27] Hulten, Charles R. "The Measurement of Capital" dalam Fifty Years of Economic Measurement: The Jubilee of the Conference on Research in Income and Wealth. 1991. University of Chicago Press. Tersedia di http://www.nber.org/chapters/c5974 (diakses pada 30 Oktober 2016).
[28] Ngwa, Nkwah Akongwi. 2015. "The Comparative Impact Analysis of Chinese and Turkish Development Assistance to Ethiopia from a South-South Cooperation Perspective". Paper prepared for the EY International Congress on Economics II " Growth, Inequality and Poverty" Ankara 2015. Ekonomic Yaklasim.
[29] Radelet, Steven. "Success Stories from Emerging Africa".Journal of Democracy 21, no. 4, (2010): 87-101.
[30] Rahel Kassahun. 2003. "Ethiopia's Recent Growth Performance: A survey of the literature".
[31] Paul Narcyz Rosenstein-Rodan, "Big Push" dalam Natura Facit Saltum Analysis of the Disequilibrum Growth Process. 1961.
[32] Tegenu, Tsegaye. Structural Transformation is a defining Moment that Leads Ethiopia to Modern Development. 2011.
[33] Thakur, M. 2009. "Building on Progress? Chinese Engagement in Ethiopia." Occasional paper, no. 38, China in Africa Project, South African Institute of International Affairs. http://www.saiia.org.za/occasional-papers/building-on-progress-chinese-engagement-in-ethiopia.

Artikel Daring
[34] Alebachew, Habtamu. "Ethiopian Characteristic of Economic Growth and the Politics of Growth Bump". 2013. Tersedia di http://www.meleszenawi.com/ethiopian-characteristics-of-economic-growth-and-the-politics-of-growth-bumps/ (diakses pada 14 September 2016).
[35] Bank Dunia. "Etiopia's Charts" [online] dalam http://www.theglobaleconomy.com/Etiopia/ (diakses pada 23 Maret 2016)
[36] BBC. Ethiopia Profile: Timeline. 2016. Tersedia di http://www.bbc.com/news/world-africa-13351397 (diakses pada 4 Februari 2016).
[37] Library Congress. Country Profile: Ethiopia. 2005. Tersedia di https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Ethiopia.pdf (diakses pada 29 Juni 2016).
[38] Pasquali, Valentina. "Countries with Highest GDP Growth 2015".Global Finance.8 Desember 2015.Tersedia di http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/ country-notes/ETH.pdf (diakses pada 7 Desember 2016).
[39] The Global Economy. Tersedia di http://www.theglobaleconomy.com/compare

-countries/ data diambil dari Bank Dunia. (diakses pada 4 Februari 2016).

Dokumen Pemerintah

[40] EFME, Ethiopian Federal Ministry of Education. "Education Statistic Annual Abstrac 2005 E.C (2012/2013 G.C). Addis Ababa. 2013.

[41] MoFED. Ethiopia: Sustainable Development and Poverty Reduction Program. Federal Democratic Republic of Ethiopia. Addis Ababa. 2002.

[42] MoFED. Ethiopia: Building on Progress. A Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty (PASDEP).Addis Ababa. 2006.

Dokumen Lembaga Non-Pemerintah

[43] Lenhardt, Amanda et al. 2015. "One Foot on the Ground, one foot in the air: Ethiopia's delivery on an ambitious development agenda". Overseas Development Institute.

[44] Geiger,Michael., Chorching Goh, Jingyi Zhang, Xiaochen Fu, Danqing Zhu, Jingyang Zhang, Su Qian. Chinese FDI in Ethiopia. The World Bank Group. 2012.

[45] UN Population Division. World Population Prospects: The 2012 Revision. New York: United Nation. 2013.

[46] Webb, Patrick et.al. Famine in Ethiopia: Policy Implications of Coping Failure at National and Household Levels. Research report 92. International Food Policy Research Institute. Washington D.C. 1992. Tersedia pada http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABN068.pdf (diakses pada 6 Agustus 2016).

Tesis

[47] Alemnew, Teklebirhan. "Public Infrastructure Investment, Private Capital Formation and Economic Growth in Ethiopia" 2016. Arba Minch University.

[48] Balcha, Tadesse Demissie. "Sources of Economic Growth in Etiopia: A Time Series Empirical Analysis, 1981-2009". Master thesis for the Master of Philosophy in Enviromental and Development Economics. University of Oslo. 2011.

[49] Gebru, Tewodros. "The Determinants of Economic Growth in Ethiopia: A Time Series Analysis". Addis Ababa University: Addis Ababa. 2015.

[50] Mustefa, Siraj. "Private Investment and Economic Growth Evidence From Etiopia". Mekelle. Tesis Mekelle University Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Ekonomi. 2014.

[51] Zenawi, Meles. "African Development: Dead Ends and New Beginnings"..